#### BAB V

#### KESIMPULAN DAN SARAN

# 5.1 Kesimpulan

- 1. Analisis yang dilakukan menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) menghasilkan daftar risiko kritis yang didapatkan dari risiko-risiko yang memiliki nilai *Risk Priority Number* (RPN) diatas nilai kritis. Dari 20 risiko, terdapat 10 risiko yang dikategorikan sebagai risiko kritis, risiko tersebut adalah Tidak ada subsidi pemerintah dalam membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pangan (Kebijakan), Tidak ada kebijakan pemerintah dalam penyaluran bahan makanan ke pasar (kebijakan), Tidak ada alternatif jalan menuju pasar pasca bencana longsor (akses ke pasar), Akses jalan ke pasar pasca bencana longsor rusak (akses ke pasar), Pasokan bahan makanan ke pasar terganggu (akses ke pasar), Akses jalan ke pertanian/ladang pasca bencana longsor rusak (akses ke area pertanian), Masyarakat berada di daerah pengungsian sehingga susah untuk ke lahan pertanian (ekonomi dan sosial), Tidak ada alternatif jalan menuju pertanian/ladang pasca bencana longsor (akses ke area pertanian), Pasca bencana infrastruktur lahan pertanian/ladang rusak (akses ke area pertanian), Pasca bencana gempa tidak ada angkutan yang memadai untuk membawa bahan pangan ke pasar (akses ke pasar).
- 2. Analisis yang dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan risiko menghasilkan klasifikasi dari masing-masing risiko. Dari total 20 risiko yang diidentifikasi, terdapat 6 risiko yang diklasifikasikan risiko sedang (30%) dan 14 risiko diklasifikasikan risiko rendah (70%). Risiko yang diklasifikasikan risiko sedang adalah Akses jalan kepasar pasca bencana longsor rusak (Akses ke pasar), Tidak ada alternatif jalan menuju ke pasar pasca bencana longsor (Akses ke pasar), Tidak ada alternatif jalan menuju pertanian/ladang pasca bencana longsor (Akses ke area pertanian), Masyarakat berada di daerah pengungsian sehingga susah untuk ke lahan pertanian (Ekonomi dan sosial), Tidak ada kebijakan pemerintah dalam penyaluran bahan makanan ke pasar (Kebijakan), Tidak ada subsidi pemerintah dalam membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pangan (Kebijakan).
- 3. Penelitian ini memiliki kelemahan pada hasil kuesioner yang menunjukan perbedaan penilaian signifikan yang diberikan oleh responden. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kurangnya kejelasan dan ketidakpastian dalam skala penilaian yang digunakan sehingga membuat perbedaan persepsi dari masing-masing responden. Hal ini berpotensi mengurangi keakuratan data dan hasil penelitian yang diperoleh.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari analisis risiko menggunakan metode FMEA terhadap kasus bencana longsor di desa Kubang Tangah, terdapat beberapa saran kepada penelitian selanjutnya dan kepada pemerintah kota Sawahlunto untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi :

## 5.2.1 Saran untuk penelitian selanjutnya

- 1. Untuk penelitain selanjutnya diharapkan untuk bisa melibatkan lebih banyak desa yang terdampak di kota Sawahlunto sehingga mendapatkan landasan yang lebih kuat untuk merancang strategi mitigasi bencana longsor kedepannya.
- 2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbaiki kuesioner dengan lebih menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Hal ini bertujuan agar kuesioner dapat menggambarkan risiko kegagalan yang mengganggu ketahanan pangan yang sebenarnya.
- 3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan penjelasan skala penilaian yang bersifat kuantitatif sehingga responden dapat memberikan pemahaman yang sama dalam memberikan penilaian sehingga data yang diperoleh lebih akurat, valid dan sesuai dengan kondisi kenyataan.

### 5.2.2 Saran bagi pemerintah kota Sawahlunto

- 1. Diperlukannya kerjasama pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan kesiapan darurat untuk situasi longsor seperti kebijakan mengenai subsidi logistik yang jelas terdahap masyarakat yang terdampak bencana longsor sehinnga ketersediaan dan aksesibilitas logistik cukup terjamin.
- 2. Diperlukany<mark>a kerjasama pemerintah kota S</mark>awahlunto untuk pemulihan dan pengembangan alternatif jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa dengan infrasturktur pangan.
- 3. Diperlukanya kerjasana pemerintah kota Sawahlunto dengan lembaga-lembaga terkait sehingga dapat memperkuat respon dan koordinasi yang baik dalam penyaluran bantuan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam.